

## Anggaran Pendidikan 23 Persen

**PONTIANAK**- Gubernur Kalimantan Barat Cornelis membantah tuduhan anggaran pendidikan pada 2012 kurang dari 20 persen. "Tidak benar anggaran pendidikan tidak sampai 20 persen. Anggarannya sudah lebih dari 20 persen, hampir 23 persen," ujar



Tidak benar anggaran pendidikan tidak sampai 20 persen. Anggarannya sudah lebih dari 20 persen, hampir 23 persen

### Cornelis

Cornelis dalam paripurna bersama DPRD Kalbar, Kamis (15/12).



Cornelis menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar mendapatkan wewenang sektor pendidikan dari pemerintah pusat, sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

• ke halaman 15 kolom 2

## Anggaran Pendidikan 23 Persen

*Sambungan dari halaman 9*

Sekolah. Pengelolaan BOS diserahkan ke pemprov, sehingga anggaran pendidikan tahun depan bertambah Rp371 miliar.

"Dengan demikian, urusan pendidikan sudah lebih dari 20 persen. Sengaja saya tidak bilang, karena ini yang disebut politik anggaran," ungkap bapak dari anggota DPR, Karolin Margret Natasha ini.

Ia menambahkan dengan penyerahan urusan kepada pemerintah provinsi berarti ada urusan pembiayaan. Adanya tambahan dana, berarti ada tambahan pekerjaan. Menurut Cornelis, Pemerintah Provinsi Kalbar siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat tersebut.

"Menyangkut masalah pendidikan ini memang selalu dikomentari. Karena ada dalam UU 1945 bahwa anggaran pendidikan 20 persen. Kita bisa memberikan 20 persen dari APBD jika mempunyai wewenang tugas dan tanggungjawab yang jelas," ujar Cornelis.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar hanya mengurus pekerjaan yang menjadi urusannya. Ia minta semua pihak agar tidak lagi mencari pekerjaan yang bukan urusannya. Misalnya Jalan Trans Kalimantan, Bandara Supadio, dan pelabuhan

bukan menjadi wewenang pemprov.

"Boleh penyertaan modal karena mereka itu profit. Tapi bagian kita mana. Kalau kita menyumbang terus, nanti diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Untuk pendidikan, dengan ada penyerahan, berarti bertambah anggaran dan tugas. Itu menjadi wewenang kita," katanya.

Seluruh fraksi di DPRD menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kalbar 2012 untuk ditetapkan menjadi Perda. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kalbar, kemarin. Namun, fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah catatan untuk pemprov.

Fraksi Gerindra Sejahtera Baru misalnya. Secara umum, fraksi ini berharap agar APBD dapat membawa sentuhan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalbar. Sebab, APBD dinilai sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. "Kalau boleh diibaratkan, APBD itu seperti darah manusia yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh," kata Antonius Situmorang saat membacakan pendapat akhir fraksinya.

Situmorang juga menyebutkan, penyusunan APBD ini telah melalui beberapa

tahapan seperti perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemeriksaan dan penegakan hukum mana kala terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Fraksi ini berharap, semua lembaga terkait dalam setiap tahapan itu dapat benar-benar bekerja sesuai tugas masing-masing.

Sementara Fraksi PPP antara lain lebih menekankan pada kerjasama yang baik antara gubernur dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas. Sebab, ada indikasi sebagian kepala SKPD kurang serius membantu gubernur. Hal itu tercermin pada kurangnya antusiasme SKPD saat rapat-rapat bersama DPRD. Padahal, banyak keluhan dan aspirasi warga yang ingin disampaikan oleh DPRD agar pelaksanaan pemerintahan berjalan tertib dan lancar. "Kalau tidak ada kebersamaan, kami khawatir tahun depan pemprov tidak dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Tetapi mudah-mudahan tahun 2012 tidak terjadi disclaimer opinion karena ada pejabat yang tidak mampu menerjemahkan keinginan gubernur. Kami berharap akhir jabatan gubernur nantinya adalah mendapat predikat WTP dari BPK," kata Ali Akbar, Ketua FPPP. **(uni/ron)**